

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan SPIP di KPU Provinsi Jambi sudah cukup baik, akan tetapi masih memiliki beberapa kelemahan pada beberapa unsurnya, yaitu :

a. Lingkungan pengendalian

- Pada subunsur Penegakan Integritas dan Nilai Etika terdapat beberapa kelemahan yaitu seluruh pegawai belum menandatangani pernyataan komitmen (pakta integritas), serta pegawai belum mengetahui, memahami dengan baik isi pakta integritas yang mengatur aturan perilaku, standar etika, sanksi hukuman terhadap pelanggaran aturan perilaku/standar etika.
- Pada subunsur pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan masih belum memadai dikarenakan jumlah pegawai terutama untuk posisi pimpinan belum sesuai kebutuhan.
- Untuk subunsur penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia masih belum memadai dikarenakan belum adanya kebijakan instansi untuk penulusuran latar belakang calon pegawai.

b. Penilaian risiko

- Terkait dengan kegiatan identifikasi risiko, ditemukan fakta bahwa KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi masih memiliki kelemahan. Hal ini disebabkan KPU Provinsi Jambi dan KPU Kota Jambi tidak memiliki daftar risiko yang mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis baik itu di internal maupun eksternal instansi.

c. Kegiatan Pengendalian

- Pada kegiatan pembinaan sumber daya manusia masih belum memadai dikarenakan minimnya penyelenggaraan bimtek dan diklat SPIP
- Pada kegiatan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting belum dapat dikategorikan memadai karena belum terpenuhi dan terlaksana sepenuhnya.

d. Pemantauan

- Pada unsur pemantauan masih terdapat kelemahan yaitu APIP (inspektorat) yang melaksanakan belum melaksanakan evaluasi terpisah memiliki sumber daya, kemampuan, dan independensi yang memadai.

2. Dari kesimpulan diatas, maka unsur informasi dan komunikasi dinilai telah cukup memadai dan telah sesuai dengan prinsip pengendalian internal COSO, sedangkan unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan pemantauan masih memiliki kelemahan dalam penerapannya

6.2. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi KPU, pentingnya komitmen pimpinan dalam penambahan alokasi anggaran penerapan SPIP di KPU, memperbanyak kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan SPIP di KPU guna peningkatan pemahaman organisasi akan penyelenggaraan SPIP, dan penambahan jumlah SDM di KPU.
2. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk memperluas lingkup wawancara seperti pihak eksternal lainnya seperti BPK, IAI (Ikatan Auditor Indonesia), serta akademisi yang memahami penyelenggaraan SPIP. Dengan penambahan jumlah informan diharapkan dapat lebih menambah kajian dalam mendeskripsikan penerapan SPIP di lokasi penelitian.